

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu dari jurnal dan skripsi yang merujuk pada tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul, Objek yang diteliti	Perbedaan	Persamaan
Djamilatul Chasanah (2018)	Analisis Kepuasan Konsumen Melalui Kualitas Pelayanan Uji Kir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar	Data Yang Diambil Adalah Dalam Lingkup Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Dan Menggunakan Metode Kualitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang Uji KIR

Hadwitya Handayani K (2019)	Sistem Informasi Kir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Berbasis Android	Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dishubkominfo Kabupaten Tegal	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang Sistem Informasi KIR
--------------------------------	--	--	--

Nama dan Tahun Penelitian	Judul, Objek yang diteliti	Perbedaan	Persamaan
		Metode Penelitian Kualitatif	
Ikhron Nuradha (2021)	Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kota Serang Metode Penelitian Kuantitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang uji KIR
Neng Senja Nekida (2018)	Implementasi E-Ticketing uji kelayakan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik	Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Metode Penelitian Kualitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang E-Uji KIR

ANITA RESKI AMALIA (2021)	Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep	Data Yang Diambil Adalah Dalam Lingkup Pada Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep Dan Menggunakan Metode Kualitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang KIR
Ghani Nur Wicaksono (2016)	Analisis Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dishubkominfo Kabupaten Tegal	Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup Pengujian Kendaraan Bermotor di Dishubkominfo Kabupaten Tegal Metode Penelitian Kualitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang E-KIR
Arenawati, Listyaningsih (2016)	Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Ijin Trayek Dan Kir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kota Serang	Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kota Serang Metode Penelitian Kuantitatif	Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang E-KIR

<p>Abdul Riky Rifan (2021)</p>	<p>Analisis E-KIR terhadap kualitas pelayanan dan uji kelayakan berkala pada kendaraan bermotor di UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo</p>	<p>Data Yang Diambil Oleh Peneliti Adalah Dalam Lingkup UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Metode Penelitian Kualitatif</p>	<p>Membahas tentang topik yang sama yaitu tentang aplikasi E-KIR yang dalam penelitiannya menghasilkan sejumlah temuan diantaranya adalah bahwa Implementasi dari aplikasi E-KIR bertujuan untuk memudahkan proses pelayanan dan transaksi online dalam pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan yang responsif dalam hal pemberian pelayanan dengan cepat, tepat, dan keluhan dari pelanggan direspon dengan baik oleh petugas. Keunggulan lain yang terdapat pada aplikasi ini yaitu mereka bisa melihat banyaknya biaya kontribusi yang harus mereka bayar setelah kendaraan yang mereka uji dinyatakan layak atau lulus. Faktor pendukung dalam</p>
------------------------------------	---	---	--

			implementasi program E-KIR terdiri atas kerjasama yang baik dan Sumber Daya Manusia sedangkan faktor penghambatnya adalah terdiri atas faktor eksternal dan internal
--	--	--	--

Sumber : diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2022

Dasar yang berupa teori atau temuan melalui hasil dari berbagai penelitian yang ada sebelumnya dirasa sangat perlu dan juga dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian. Suatu data pendukung yang peneliti rasa perlu dijadikan bagian tersendiri yaitu penelitian terdahulu yang tentunya harus relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, fokus terhadap penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah terkait dengan adanya Implementasi sebuah Program atau dengan kebijakan publik serta pembangunan berbasis masyarakat, karena hal itu di sini peneliti melakukan kajian beberapa hasil penelitian yang ada.

Peneliti Pertama dengan judul “Analisis Kepuasan Konsumen Melalui Kualitas Pelayanan Uji Kir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar” oleh Djamilatul Chasanah (2018) Penelitian skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Analisis dari Program Uji KIR Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terus mengembangkan dan

meningkatkan kualitas pelayanan uji kir untuk kepuasan konsumen, dalam hal ini pelayanan yang diberikan agar semakin berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang terdiri dari lima indikator yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, empati dan jaminan terhadap kepuasan konsumen yang melakukan uji kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Variabel independen pada penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang meliputi bukti langsung, keandalan, daya tanggap, empati dan jaminan, sedangkan variabel dependen yaitu kepuasan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen. Sampel dalam penelitian ini yang melakukan uji kir sebanyak 123 konsumen. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan terbukti kelima indikator faktor terkuat dalam menjelaskan kualitas pelayanan berturut turut adalah bukti langsung, empati, daya tanggap, kehandalan dan jaminan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Beberapa hal yang harus diperhatikan agar program ini berjalan sesuai dengan targetnya yaitu sasaran lokasi yang akan dijadikan untuk tempat penampungan yang sekiranya tidak merugikan pihak manapun, penetapan sasaran program yang tepat dan konsisten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta pelaksanaan pengawasan yang tepat dan konsisten dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan program di lapangan.

Peneliti Kedua, Hadwitya Handayani K (2019), yang meneliti tentang

Sistem Informasi Kir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan Berbasis Android Pengujian KIR perlu dilakukan supaya kendaraan yang beroperasi sesuai dengan persyaratan dan aman untuk layak jalan. Dari pengamatan Pada Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan terdapat beberapa pemohon yang belum mengetahui persyaratan maupun alur dari pengujian KIR. Maka dari itu Dinas Perhubungan membutuhkan sebuah Sistem Informasi KIR Kendaraan. Sistem ini dibuat untuk memberikan informasi bagi pemohon yang masih bingung dalam persyaratan pengajuan pengujian dan juga retribusi. Sistem ini berbasis android dibuat menggunakan IDE Android Studio, serta menggunakan MySQL sebagai database. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi KIR kendaraan pada Dinas Perhubungan dapat membantu menampilkan informasi persyaratan, alur, retribusi serta data kendaraan untuk pemohon sebelum melakukan pengajuan uji KIR pada dinas perhubungan melalui ponsel android.

Penelitian Ketiga, Ikhron Nuradha (2021), yang meneliti tentang Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Masalah pokok dalam penelitian ini ialah Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat

dari jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Masyarakat Kecamatan Ujungbatu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan data dari dinas perhubungan yang menyatakan banyak kendaraan yang wajib KIR tidak melakukannya, kurangnya pelaksanaan uji berkala ini juga dipengaruhi oleh faktor dari dinas perhubungan sendiri yang mana dinas perhubungan tidak memiliki personel dan anggaran yang dianggap tidak memadai guna melakukan pengecekan langsung ke jalan, yang mana cara ini merupakan salah satu cara yang paling ampuh guna melakukan pelaksanaan uji KIR secara menyeluruh.

Penelitian Keempat, Neng Senja Nekida 2018 meneliti tentang Implementasi E-Ticketing uji kelayakan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Tradisional yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan, karena sistem tersebut menjadikan pelayanan kurang efektif dan efisien. Transformasi traditional government menjadi electronic government (e-Government) menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini, karena hampir semua perusahaan dan instansi sudah beralih ke sistem yang komputerisasi. Salah

satunya pengelolaan layanan uji kendaraan bermotor, dalam proses layanannya banyak permasalahan terutama pada pelayanan pendaftaran pengajuan uji KIR yang masih manual, itu mengakibatkan penumpukan antrian karena dibatasinya kuota uji kendaraan, banyak pemilik kendaraan yang tidak mendapatkan informasi berapa jumlah antrian yang sudah masuk, hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diperbaiki agar pelayanan publik semakin membaik. Model pendekatan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu model waterfall, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan databasenya menggunakan MySQL. Tujuan penelitian yaitu menerapkan sistem informasi E-Ticketing untuk memberikan kemudahan dalam mengelola informasi dengan cepat, tepat dan akurat serta memberikan kemudahan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan pendaftaran uji kendaraan tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan Kota Sukabumi

Penelitian kelima, Anita Reski Amalia (2021) meneliti tentang Analisis Kualitas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep dapat dilihat dari dimensi Tangible (berwujud) yang belum sepenuhnya memenuhi kualitas pelayanan dengan baik dari segi pengadaan sarana meliputi: adanya alat pengujian kendaraan yang tidak berfungsi, kursi yang masih perlu ditambah dan juga gedung tempat pengujian kendaraan perlu untuk dibenahi dan dijaga kebersihannya. Sedangkan dari segi pelayanan yang

diberikan sudah baik, penampilan pegawai rapi, ruangan tempat pelayanan sudah nyaman serta ruangan pegawai sudah dilengkapi fasilitas. Dimensi Reliability (kehandalan) pegawai dalam melakukan pelayanan sudah baik dan pegawai sudah menyediakan pelayanan yang terpercaya dengan menjalankan standar dan prosedur layanan yang sudah ditentukan agar dapat memuaskan pelanggan.

Penelitian keenam Ghani Nur Wicaksono (2018) meneliti tentang Analisis Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dishubkominfo Kabupaten Tegal. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk membuat sistem informasi pengujian kendaraan bermotor yang dapat membantu petugas dalam melakukan pelayanan pengujian kendaraan. Sistem informasi ini dibuat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak sekuensial linier yang terdiri dari analisis, desain, kode, tes, dan debugging yang diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL dengan menggunakan *Framework Codeigniter*. Pengujian yang dilakukan terhadap sistem ini yaitu pengujian *black box* dan pengujian kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: sistem dapat berfungsi baik diperoleh dari hasil pengujian *black box* 100% valid dan pengujian kinerja nilai 84. Notifikasi sms pada sistem menggunakan api ginota sms. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengujian kendaraan bermotor dapat dikembangkan menggunakan metode sekuensial linier dengan menerapkan konsep MVC framework CodeIgniter dan memiliki kinerja baik berdasarkan hasil uji *black box* dan kinerja serta dapat

mengirimkan notifikasi sms. Sistem ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan perlu pengembangan fungsi notifikasi sms menggunakan perangkat lunak lain.

Penelitian kedelapan, Arenawati, Listyaningsih (2016) meneliti tentang judul Analisis Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Izin Trayek Dan Kir Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kota Serang. Pelayanan Izin Trayek dan KIR adalah dua pelayanan penting yang merupakan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Ijin trayek dan KIR adalah prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah kendaraan, baik angkutan barang maupun angkutan manusia. Masyarakat, terutama mereka yang memiliki angkutan umum dan barang akan berhadapan dengan pelayanan terkait

penerbitan izin trayek dan KIR atau sertifikat laik jalan kendaraan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan izin trayek dan KIR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kepuasan masyarakat dalam pelayanan izin trayek dan KIR pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Serang adalah sebesar 73,25 termasuk kategori baik. Saran penelitian ini adalah memperbanyak kursi pada ruang tunggu, menambahkan mengganti alat uji KIR dengan yang lebih modern.

Penelitian Ketujuh oleh Abdul Riky Rifan (2021) bahwasannya dari judul peneliti ini masih belum ada yang menulis dengan judul “Analisis E-KIR

terhadap kualitas pelayanan dan uji kelayakan berkala pada kendaraan bermotor di UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo” dan masih dalam proses penelitian yang dikerjakan pada tahun 2021 ini dengan lokasi UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Dalam pengambilan metode menggunakan metode penelitian yaitu Kualitatif.

Pada tabel diatas, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dengan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah kesamaan pada topik yang sedang dibahas yaitu mengenai pentingnya program E KIR Sedangkan perbedaan dengan peneliti terdahulu ada meneliti dalam di lingkup Kota, ada yang meneliti di lingkup Provinsi, dan ada yang meneliti pada lingkup umum.Selain itu perbedaan dengan penelitian tersebut ada yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan ada juga yang menggunakan metode penelitian kualitatif.Dapat diartikan bahwa aplikasi E-KIR yang di observasi ada beberapa tempat sehingga hasil yang diperoleh merupakan hasil rata-rata dari beberapa pembahasan tertentu. Maknanya dari sudut pandang program E-KIR hasil tersebut tidak menggambarkan aplikasi ini sangat penting bagi pegawai dan masyarakat di seluruh Indonesia akan tetapi masih ada beberapa yang perlu dievaluasi. Sedangkan penelitian saya khusus menganalisis E-KIR Pemerintah Kota Probolinggo. Oleh karena itu, hasil yang akan didapatkan diharapkan merupakan gambaran sesungguhnya dari keunggulan E KIR atas pemberkasan administrasi Pemerintah Kota Probolinggo.

B. Kerangka Dasar Teoritik

1. Analisis Kebijakan Publik

a. Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Analisis adalah proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dipahami. Biasanya analisis dilakukan pada data-data tertentu yang berasal dari penelitian baik menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam hal ini penulis memilih analisis data kualitatif yang cocok dengan penelitian yang akan diambil. Menurut Creswell (2013) langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rosman dan Rallis, dalam Creswell, 2013: 276). Dalam proses coding ini, penulis mengkombinasikan kode-kode yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined code) dan membuat

kode kode berdasarkan informasi yang muncul dengan sendirinya (emerging code) (Creswell, 2013). Sehingga, proses coding dalam penelitian ini adalah dengan men-fit-kan kode-kode yang muncul selama proses analisis data dengan data penelitian.

4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah ini, penulis membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi, lalu menganalisisnya. Tema-tema inilah yang kemudian dijadikan judul dalam bagian hasil penelitian.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan naratif ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologis peristiwa, tema-tema tertentu, atau tentang keterhubungan antar tema.
6. Langkah terakhir adalah dengan menginterpretasi atau memaknai data. Langkah ini akan membantu penulis dalam mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln dan Guba dalam Creswell, 2013). Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang digunakan dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara diharapkan dapat diatasi dengan baik. Banyak konsep kebijakan publik yang dibahas para ahli. Menurut Chief J.O Udoji (dalam

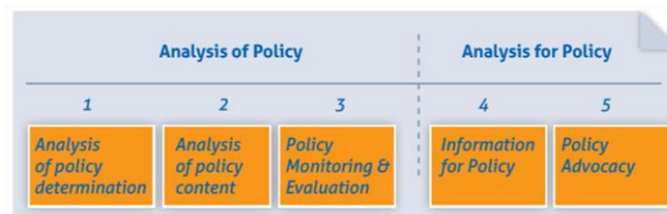
Wahab, 2004:15), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Nugroho (2008:11-15), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat.

Kebijakan publik memang sudah sepatutnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat, sehingga segala kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bukan hanya atas nama kepentingan publik saja, tetapi juga benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan publik juga menjadi sarana yang mendukung aspirasi masyarakat dan mampu mengakomodir semuanya menjadi suatu cita-cita bersama.

c. Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik adalah proses pemecahan masalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk merealisasikan tujuan negara serta mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam kegiatan menganalisis kebijakan Wayne Parsons (2001) membedakan antara *analysis of policy* dengan *analysis for policy* dengan gambar sebagai berikut:

Gambar 2.



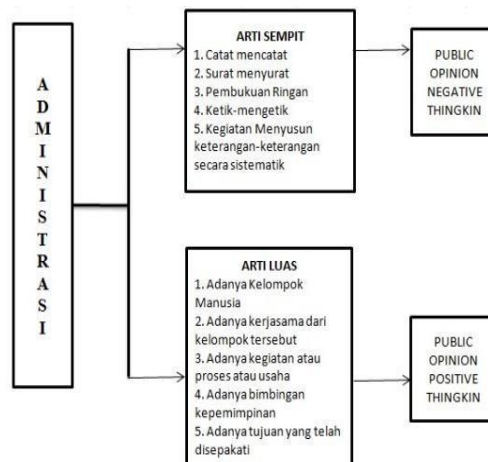
Perbedaan antara *Analysis of Policy* dan *Analysis for Policy*

Analysis of policy (Analisis terhadap kebijakan) Yang termasuk dalam kegiatan “*analysis of policy*” adalah analisis terhadap Batasan sebuah kebijakan, yaitu analisis yang difokuskan pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa (target group) sebuah kebijakan dibuat.

2. Administrasi Publik

Administrasi Secara etimologis,bersumber dari bahasa latin yang terdiri dari ad + ministrare yakni administrate, yang secara operasional melayani atau membantu. Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak bisa dilakukan oleh satu

orang saja, karena membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih (Alemina Henuk Kacaribu. 2020). Administrasi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu:



Gambar 3 Pembagian Administrasi

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda), yang meliputi kegiatan: catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work) (Silalahi, 2013:5)
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa Inggris), yaitu “Administration as the activities of groups cooperating to

accomplish common goals” (administrasi adalah kegiatan kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama) (Afifuddin, 2010: 3-4).

a. Ruang Lingkup Administrasi

Cakupan atau ruang lingkup administrasi publik sangat kompleks tergantung dari perkembangan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Menurut Pasolong (2008:21) mengemukakan ada delapan ruang lingkup administrasi publik yaitu, “kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik”. Sedangkan menurut pendapat Henry sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2008:19) menyebutkan ruang lingkup administrasi publik terdiri dari:

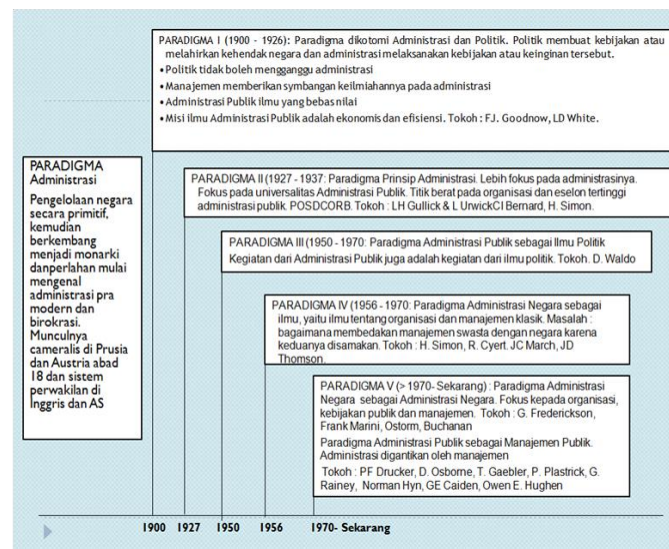
- 1) Organisasi publik, pada prinsipnya berkaitan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- 2) Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- 3) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan public dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi publik meliputi organisasi publik; kebijakan publik; birokrasi publik; manajemen publik; kepemimpinan; pelayanan

publik; administrasi kepegawaian negara, kinerja, dan etika administrasi publik; ruang lingkup administrasi publik di bidang hubungan, peristiwa dan gejala pemerintahan; dan ruang lingkup administrasi publik di bidang kekuasaan (Enhanced Reader, 2022)

b. Paradigma Administrasi Publik

Thomas. Kuhn, menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang nilai-nilai, metode-metode, prinsip-prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Administrasi mengalami 5 perkembangan dalam paradigma yang mana tiap paradigma mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus serta fokusnya sebagai berikut:

Gambar 4 Perkembangan Paradigma Administrasi



Sumber: I Ketut Suardi, 2021

a. Paradigma I (1900 – 1926) Paradigma Dikotomi Politik Administrasi Terdapat dua fungsi pokok pemerintah yaitu politik dan administrasi. Maka permasalahannya adalah dimana administrasi Negara berada, sehingga dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik. Namun, administrasi Negara sebenarnya harus berada pada birokrasi pemerintahan. Fungsi politik akan melahirkan kebijaksanaan sebagai pencerminan kehendak negara sedangkan fungsi administrasi berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijaksanaan tersebut. Karena adanya perbedaan kedudukan ini, maka baik akademik maupun praktisi sering memperdebatkan apa yang kemudian disebut sebagai dikotomi politik administrasi.

b. Paradigma II (1927 – 1937) Prinsip-prinsip Administrasi Dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Dalam periode ini administrasi negara lebih menonjolkan Fokus dari administrasi negara itu sendiri. dalam kenyataannya prinsip administrasi terdapat baik pada organisasi industri, pemerintahan dan sebagainya, dengan tanpa memandang aspek budaya, lingkungan, tujuan ataupun jenis organisasinya.

c. Paradigma III (1950 – 1955) Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik Merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali

hubungan konseptual antara administrasi Negara dan ilmu politik. Dan pada fase ini administrasi Negara telah berkembang sebagai bagian dari ilmu politik. Karena adanya kritikan dari kedua hal tersebut yang tidak benar maka administrasi negara mundur ke dalam disiplin induknya yaitu pada birokrasi pemerintahan (Ilmu Politik).

d. Paradigma IV (1956 – 1970) Administrasi Negara Sebagai Ilmu Administrasi Perkembangannya diawali ketidaksenangan bahwa ilmu administrasi dianggap sebagai ilmu kelas dua setelah ilmu politik. Usaha pengembangannya bertujuan untuk mempercepat proses mencari alternatif paradigma ilmu administrasi. Istilah ilmu administrasi disini diartikan sebagai segala studi di dalam teori organisasi dan ilmu manajemen, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas program-program secara lebih tepat.

e. Paradigma V (1970 – sekarang) Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara Administrasi Negara Sebagai Administrasi Negara Pada proses ini administrasi Negara telah merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan dan ekonomi politik. Walaupun belum menemukan kata sepakat mengenai locus maupun focus dari administrasi negara, menurut pemikiran Herbert Simon tentang perlunya dua aspek yang perlu dikembangkan dalam disiplin administrasi negara yakni :

1. Administrasi Negara yang lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan ilmu murni administrasi.
2. Satu kelompok yang lebih besar yang memusatkan perhatiannya pada penentuan kebijaksanaan publik.

c. Pergeseran Administrasi Publik

Dalam perspektif teoritik telah terjadi pergeseran administrasi dalam perkembangan administrasi berawal dari model old public administration ke model new public administration, new public management, dan akhirnya menuju model pelayanan publik baru (new public service). Berikut tabel perbedaan dalam pergeseran administrasi yang menekankan pada pelayanan publik. Semua paradigma diatas memberikan gambaran bahwa telah terjadi perubahan orientasi administrasi. Jika dilihat dalam tatanan empirik dapat dikatakan bahwa perubahan paradigm ini diawali adanya kegagalan dalam mengelola negara sehingga muncul paradigma baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

d. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik

Secara konseptual, kebijakan publik dipelajari oleh dua rumpun ilmu disiplin yakni ilmu politik dan administrasi publik. Menurut konsep ilmu administrasi publik, kebijakan publik berasal dan dibuat oleh pemerintah (manajemen) sebagai fungsi dinamis dari negara (organisasi) yang ditujukan

untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan. Administrasi publik berperan dalam perumusan kebijakan negara. Nigro dan Nigro (1980) menyatakan bahwa administrasi publik peranannya sangat penting dalam perumusan kebijakan Negara.

Dalam proses pemerintahan hubungan administrasi publik dengan kebijakan publik yakni Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dalam perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Gordon, 1982). Hal tersebut memengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mencakup analisis dan perumusan kebijakan. Bahwa administrasi publik adalah proses mengimplementasikan kebijakan. Administrasi publik berfokus pada penegakan hukum, proses pembuatan, dan penerapan peraturan, serta regulasinya dalam menyelenggarakan kebijakan publik. yang bertujuan mengatur kebijakan publik untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi dalam organisasi atau lainnya (Abdul Kadir, 2018).

e. Fungsi Administrasi

1) Planing atau perencanaan.

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi, dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok (Asnawir, 2005). Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai

kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan, yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antara orang-orang/organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (Asnawir, 2005).

3) Actuation

Fungsi Penggerakan atau Actuation. Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan.

4) Controlling atau Pengawasan.

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Setiap pelaksanaan daripada program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Selanjutnya ditambahkan fungsi administrasi pendidikan pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Pengarahan maksudnya memberi bimbingan dan petunjuk yang diberikan sebelum kegiatan pelaksanaan dilakukan, untuk memelihara, menjaga dan mengajukan organisasi melalui

orang-orang yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar setiap kegiatan yang dilakukan nanti tidak terlepas dari usaha pencapaian tujuan.

f. Unsur-unsur administrasi

Unsur umum administrasi meliputi:

1. Organisasi

Merupakan kumpulan orang dengan visi, misi dan tujuan yang sama. Adanya kesamaan ini membuat orang di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai tugas dan wewenangnya, serta bekerja sama satu sama lain agar tujuannya tercapai.

2. Manajemen

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan.

3. Komunikasi

Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. Adanya komunikasi akan mempermudah orang untuk saling bekerja sama, melaksanakan tugas dan mencapai tujuan bersama.

4. Kepegawaian

Sering juga disebut sumber daya manusia. Kepegawaian mencakup pencarian, penempatan serta penggunaan tenaga

manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analisis dan klasifikasi jabatan.

5. Keuangan

Sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penganggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan atau auditing serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya.

6. Perbekalan

Adalah perlengkapan, persediaan, logistik serta urusan rumah tangga. Bidang ini sering juga disebut administrasi perlengkapan. Fokus tugasnya ialah pembelian, persediaan, klasifikasi serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda.

7. Ketatausahaan

Merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerja sama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya.

8. Hubungan masyarakat

Perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan, agar mendapat dukungan baik. Hubungan masyarakat juga sering dikenal dengan public relation dan advertising (iklan untuk promosi).

g. Hubungan Administrasi dengan Organisasi

Administrasi adalah jenis pekerjaan yang memanfaatkan aktivitas manusia dalam pola kerjasama sebagai upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien, menurut Rahmat dalam (Siswandi, 2017). Dalam ilmu administrasi teori organisasi ditekankan pada arti dan kedudukan organisasi sehubungan dengan administrasi. Dimana organisasi tersebut merupakan wahana (wadah) dan manajemen, yang merupakan salah satu caranya yang terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Anggara, 2012).

Berbicara tentang hubungan antara administrasi dengan organisasi, Administrasi yang selalu meninjau kegiatan atau aktivitas organisasi. Jadi kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien dalam melakukan segala hal yang dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga pemerintahan agar bisa tercapai secara maksimal. Organisasi atau lembaga pemerintah juga melibatkan seseorang untuk bekerjasama antara pihak administrasi dengan organisasi agar bisa mencapai keinginan kedua belah pihak.

3. Kebijakan Publik

Menurut Soetopo kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Agar kebijakan tersebut

mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Soetopo, 2005:10). Pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Anggara, 2014).

Meskipun pendapat yang dikemukakan berbeda-beda, pada intinya para ahli kebijakan memiliki kesepakatan yang sama, yakni bahwa kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah (termasuk lembaga-lembaga pemerintahan) yang ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat/warga negara). Dalam prosesnya, kebijakan publik hendaknya bersifat komprehensif, yakni memperhatikan berbagai hal yang mungkin dapat memengaruhi atau dipengaruhinya.

Salah satu kebijakan yang dirumuskan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan digunakan dalam upaya mitigasi pemerintah dalam situasi pandemi covid-19 di Indonesia adalah kebijakan cash for work melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 177/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis

Masyarakat Tahun Anggaran 2021. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan penghasilan tambahan kepada kelompok berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi covid-19 guna meningkatkan daya beli masyarakat di kelurahan/desa sasaran program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini:

Gambar 5 Tahap – tahap Kebijakan



William Dunn (2003: 32-34) menjelaskan, dalam menciptakan kebijakan publik terdapat proses dan variabel, antara lain:

Sumber: William Dunn (2003: 32-34)

(1) Tahap penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada akhirnya, beberapa

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

(2) Tahap formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan- pilihan kebijakan oleh pemerintah. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

(3) Tahap adopsi kebijakan yakni, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas

(4) Tahap implementasi kebijakan (policy implementation) yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

(5) Tahap evaluasi kebijakan. (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah

kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tujuan dari kebijakan publik adalah menyerap sumber daya, mendistribusikan sumber daya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumber daya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat Negara serta memperkuat pasar (William N. Dunn / Pengantar Analisis Kebijakan Publik | Perpustakaan Lembaga Administrasi Negara, t.t.)

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektivitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik. Efektivitas merupakan aspek pembentuk kinerja, suatu dimensi penilaian yang fokus pada pencapaian tujuan kebijakan. Untuk mengefektifkan kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan adanya sifat implementasi kebijakan. Sifat kebijakan publik dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Self Executing yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain dan Non-Self Executing bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

4. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Dimana didalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan teknik dipakai secara bersama dan simultan.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta,1990:327). Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. (Abdul Wahab, 1997 : 67). Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau di implmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai teori implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Teori George C. Edward

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjelaskan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara 2014, kebijakan publik), menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain sebagai berikut.

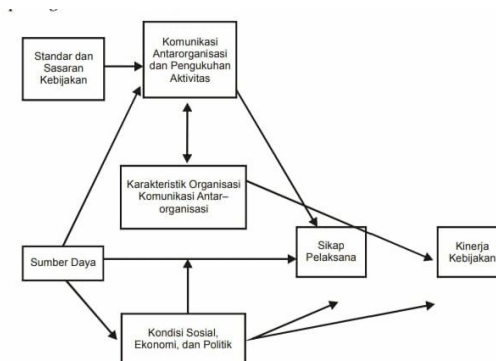
1. Tujuan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
3. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkies pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari

eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).

5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).
6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap)

Untuk lebih jelasnya, model Van Meter dan Van Horn tampak pada gambar dibawah ini:

Gambar 6 Model teori Implementasi Van Meter dan Van Horn



Gambar 10. 2
Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn
 Sumber: Diadaptasi dari Van Meter dan Van Horn (1975: 460)

Sumber: (Anggara 2014, kebijakan publik).